



PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

TAHUN 2007/2008



PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB
Jakarta, 2007



**BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
(BAKORNAS PB)**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta 10120
Telp. (021) 344 2734, 344 3078, 345 8400, 344 2772, 350 7521; Fax. (021) 350 5075, 351 9737, 345 8500
Website : <http://www.bakornaspbp.go.id>

KATA PENGANTAR

Dari aspek geologis, geografis, dan morfologis, Indonesia merupakan salah satu kawasan yang rawan terhadap bencana banjir. Hampir setiap tahun bencana banjir terjadi di Indonesia, Khususnya di Wilayah bagian Barat .

Salah satu aspek penting timbulnya korban jiwa dan kerusakan/kerugian pada beberapa aspek, adalah kekurangan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat/pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana.

Dalam kaitan kesiapsiagaan tersebut, setiap daerah perlu melakukan upaya nyata antara lain melalui kebijakan, perencanaan kontinjensi dan rencana operasi untuk menghadapi ancaman banjir di daerah melalui koordinasi Satlak/Satkorlak PB.

Sesuai dengan direktif Presiden RI dan arahan Wakil Presiden RI/Ketua Bakornas PB tahun 2006, telah ditugaskan BAKORNAS PB untuk menyusun panduan bagi daerah dalam upaya mengantisipasi banjir.

Buku Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir tahun 2007/2008 bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi banjir. Kami berharap Pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi upaya penanggulangan bencana di daerah.

Jakarta, November 2007.

Kalaxhar BAKORNAS PB,

ttd

Dr. Syamsul Ma'arif, MSi

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2007/2008	
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEBIJAKAN	1
III. PENUTUP	3
RENCANA KONTINJENSI NASIONAL DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR TAHUN 2007/2008	
I. GAMBARAN UMUM	5
II. POTENSI BENCANA BANJIR 2007-2008.....	6
2.1. Daerah Potensi Rawan Banjir	6
2.2. Perkiraan Kejadian Banjir.....	6
III. SKENARIO KEJADIAN.....	7
IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	7
4.1. Kebijakan	7
4.2. Strategi.....	8
V. POLA PENANGANAN	8
5.1. Umum.....	8
5.2. Kesiapsiagaan.....	8
5.3. Tanggap Darurat	9
5.4. Pemulihan Darurat.....	10
VI. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PENGALIHAN SUMBER DAYA.....	10
6.1. Kebutuhan Sumberdaya.....	10
6.2. Pengalihan Sumber Daya Sektoral.....	10
6.3. Dukungan BAKORNAS PB	11
6.4. Rencana Biaya	11
VII. KOORDINASI DAN RENCANA PELAKSANAAN.....	11
7.1. Tingkat Pusat	11
7.2. Tingkat Provinsi.....	13
7.3. Tingkat Kabupaten/Kota	14
7.4. Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait.....	14
7.5. Instansi Teknis Pusat di Kabupaten/Kota.....	15
7.6. Unsur Masyarakat.....	15
VIII. PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	15
8.1. Dalam hal terjadi bencana.....	15
8.2. Dalam hal tidak terjadi bencana	16
IX. PENUTUP	16
RENCANA OPERASI NOMOR 2/2007 PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR	
I. DASAR.....	29

II. SITUASI	29
III. TUGAS POKOK.....	30
IV. INSTANSI YANG TERLIBAT	31
V. PELAKSANAAN	31
a. Konsep Operasi	31
b. Pada Tahap Kesiapsiagaan	34
c. Pada Tahap Tanggap Darurat.....	36
VI. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	39
VII. KOMANDO DAN PENGENDALIAN.....	39



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2007/2008

PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB
Jakarta, 2007

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TAHUN 2007/2008

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan dinamika cuaca dan iklim, maka di wilayah Indonesia dipredikasi BMG akan terjadi curah hujan yang tinggi dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret 2007. Sifat hujan yang demikian akan berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di Indonesia.

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistim pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat adanya sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya.

Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

II. KEBIJAKAN

Secara umum kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia adalah :

- a. Penanganan bencana dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan mekanisme Bakornas PB.
- b. Perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat.
- c. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu

terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat baik sebelum terjadi, saat terjadi maupun setelah terjadi bencana.

- d. Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Ketua Satkorlak PB dan Satlak PB sebagai penanggung jawab utama penanganan bencana di daerah.

Berdasarkan pada kejadian bencana banjir tahun 2006, Presiden Republik Indonesia telah memberikan direktif kepada Kepala Pelaksana Harian Bakornas PB pada tanggal 26 Desember 2006 agar :

1. Melakukan upaya pencarian korban bencana yang dilaporkan hilang,
2. Melakukan perawatan dan pelayanan terhadap pengungsi dengan memberikan :
 - makanan
 - kesehatan dan obat-obatan
 - air bersih dan sanitasi
 - tenda dan tempat penampungan
3. Mengerahkan seluruh sumber daya dan logistik yang ada termasuk :
 - pesawat dan helikopter TNI
 - kapal-kapal TNI AL untuk Re-supply
 - perahu karet.
4. Mengerahkan personil-personil TNI, PMI, dan unsur-unsur lain dan dikoordinasikan dengan baik.
5. Memperbaiki (relief operation) infrastruktur utama seperti tanggul, jalan dan listrik.
6. Menggunakan dana Pemerintah Pusat (c/q Bakornas PB) dengan cepat dan tepat, serta akuntabel,
7. Mengkomunikasikan melalui pers berupa pemberitaan yang akurat dan tidak menimbulkan kepanikan.

2. Strategi

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Kesiapan yang meliputi pencegahan, mitigasi termasuk langkah-langkah kesiapsiagaan, dengan langkah antara lain penyuluhan dan sosialisasi harus dilaksanakan secara luas, Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan mau berperan aktif mencegah dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi meskipun dengan skala kecil (tingkat masyarakat).
- b. Setiap instansi yang berkaitan agar menyiapkan perencanaan baik itu terutama meyiapkan perencanaan kontinjensi

menghadapi banjir di daerahnya.

- c. Penanganan bencana banjir dititikberatkan pada pendayagunaan sumberdaya manusia dan peralatan yang tersedia di tingkat nasional maupun daerah, diberbagai pihak baik di instansi pemerintah, termasuk TNI dan POLRI, badan usaha swasta maupun masyarakat untuk dapat melakukan penanganan sebaik-baiknya.
- d. Kerjasama dan bantuan internasional dalam penanggulangan bencana banjir dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut :
 - Tidak membebani keuangan negara
 - Sejauh mungkin memanfaatkan tenaga ahli Indonesia
 - Mematuhi hukum dan peraturan Indonesia
 - Menghargai kebiasaan dan tradisi setempat
 - Bantuan tersebut tidak mengikat
- e. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko bencana banjir meliputi
 - Penyuluhan agar tidak membuang sampah sembarangan.
 - tidak tinggal dalam bantaran sungai;
 - menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air.

III. PENUTUP

Kebijakan dan strategi ini merupakan landasan dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang pengaturan lebih lanjut secara lebih operasional diatur dalam Rencana Kontinjensi dan Rencana Operasi.



LAKHAR BAKORNAS PB

**RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI BENCANA BANJIR
TAHUN 2007/2008**

PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB
Jakarta, 2007

RENCANA KONTINJENSI DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR TAHUN 2007/2008

I. GAMBARAN UMUM

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Lebih dari 220 juta penduduk, sebagian adalah miskin dan tinggal di daerah rawan banjir. Pada umumnya bencana banjir tersebut terjadi di wilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur.



Sumber : BMG

Berdasarkan kondisi morfologis, penyebab banjir adalah karena relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata-guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air. Perubahan tata-guna lahan yang kemudian berakibat menimbulkan bencana banjir, dapat dibuktikan antara lain di daerah perkotaan sepanjang pantai terutama yang dialiri oleh sungai.

Penebangan hutan secara tidak terkontrol juga menyebabkan peningkatan aliran air (*run off*) pemukiman yang tinggi dan tidak terkendali, sehingga menimbulkan banjir bandang dan kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai.

Dari data kejadian bencana selama tahun 2003-2005, bencana hidrometeorologi menempati urutan terbesar (53,3%) dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari total bencana hidrometeorologi tersebut, 34,1%-nya adalah bencana banjir.

II. POTENSI BENCANA BANJIR 2007-2008

2.1. Daerah Potensi Rawan Banjir

Secara umum daerah yang memiliki resiko tinggi adalah di wilayah Indonesia bagian barat, karena curah hujannya lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian Timur.

Berdasarkan data BMG, di beberapa provinsi yang berpotensi rawan banjir pada bulan Nopember 2007 (awal musim penghujan), diperkirakan terjadi bencana banjir dengan *tingkat potensi tinggi* terjadi di 20 Kabupaten/Kota, *tingkat potensi menengah* terjadi di 50 Kabupaten/Kota dan *tingkat potensi rendah* terjadi di 50 Kabupaten/Kota.

Sedangkan pada bulan Desember 2007, terjadi bencana banjir dengan *tingkat potensi tinggi* di 90 Kabupaten/Kota, *tingkat potensi menengah* terjadi di 83 Kabupaten/Kota dan *tingkat potensi rendah* terjadi di 36 Kabupaten/Kota.

(Peta Prakiraan Daerah Potensi Rawan Banjir, sebagaimana Lampiran I).

2.2. Perkiraan Kejadian Banjir

Dalam perencanaan kontinjensi ini, banjir akan terjadi di 10 Provinsi meliputi 24 Kabupaten yang berpotensi rawan banjir tingkat potensi tinggi.

Provinsi yang akan mengalami banjir tersebut adalah:

- NAD
- Riau
- Jambi
- Banten
- Sumatera Selatan
- Sulawesi Selatan
- Kalimantan Selatan
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur

III. SKENARIO KEJADIAN

Dengan memperhitungkan faktor dominan curah hujan tinggi pada bulan Desember 2007, Januari 2008 dan Februari 2008 dengan puncak curah hujan pada bulan Desember 2007 dan Januari 2008. Bencana banjir diperkirakan akan terjadi di 24 Kabupaten di 10 Provinsi pada bulan Desember 2007, Januari 2008 dan Februari 2008

Dampak bencana akan terjadi pada beberapa aspek (sebagian besar di wilayah Indonesia bagian barat) dengan *tingkat kerusakan berat* pada aspek-aspek berikut:

- 3.1. **Aspek Penduduk**, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah dan penduduk terisolasi.
- 3.2. **Aspek Pemerintahan**, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan dan perlengkapan kantor dan terganggunya jalannya pemerintahan.
- 3.3. **Aspek Ekonomi**, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, rusak, hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.
- 3.4. **Aspek Sarana/Prasarana**, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.
- 3.5. **Aspek Lingkungan**, antara lain berupa kerusakan eko-sistem, obyek wisata, persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan tanggul/jaringan irigasi.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. Kebijakan

- Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat dengan memberdayakan komponen dan potensi masyarakat secara maksimal.
- Penanggulangan bencana tetap memperhatikan kearifan lokal dan mempertimbangkan aturan/norma yang berlaku secara universal.
- Penanggulangan bencana dilakukan sejak dini untuk mencegah meluasnya dampak bencana, terutama korban manusia.

- Penanganan bencana dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan jiwa manusia, dan target utama kelompok rentan.
- Penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota koordinasikan oleh dan menjadi tanggungjawab Bupati/ Walikota selaku Ketua SATLAK PB. Di tingkat Provinsi, dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB.
- Penanggulangan bencana lintas-Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggungjawab Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB.
- Penanggulangan bencana lintas-Provinsi dilakukan oleh Pemerintah cq. Laxhar BAKORNAS PB.

4.2. Strategi

- Mengaktifkan POSKO untuk memantau dan mengendalikan operasi penanganan bencana/kedaruratan.
- Mengerahkan semua sumber-daya dengan mengutamakan sumber-daya dan potensi lokal.
- Mengerahkan unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat.
- Menurunkan TRC dan melakukan penilaian kerusakan serta taksiran kebutuhan dan prediksi perkembangan kejadian untuk tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan penanganan bencana.

V. POLA PENANGANAN

5.1. Umum

Pola penanganan bencana banjir dilakukan dengan mengutamakan upaya kesiapsiagaan dan kecepatan bertindak sejak kesiapsiagaan tanggap darurat hingga pemulihan darurat.

5.2. Kesiapsiagaan

- Kesiapsiagaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah cq SATLAK PB dan SATKORLAK PB. Sedangkan Pemerintah pusat yang dikoordinasikan BAKORNAS PB sebagai unsur pendukung.
- Adapun Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan cuaca
- Pemantauan debit air sungai
- Pengamatan peringatan dini
- Penyebaran informasi
- Inventarisasi kesiapsiagaan
- Penyiapan peta rawan banjir
- Penyiapan sumberdaya untuk tanggap darurat
- Penyiapan alat-alat berat dan bahan banjiran
- Penyiapan pompa air, mobil tangki air dan mobil tinja.
- Penyiapan tenaga medis dan para-medis dan ambulance
- Penyiapan jalur evakuasi dan lokasi penampungan sementara
- Penyiapan keamanan

5.3. Tanggap Darurat, dengan kegiatan:

- Pendirian POSKO
- Pengerahan personil (Tim Reaksi Cepat)
 - Mengerahkan kekuatan personil dari berbagai unsur operasi (pemerintah dan non-pemerintah) terutama untuk penyelamatan dan perlindungan (SAR) dengan membentuk TRC untuk memberikan pertolongan/ penyelamatan dan inventarisasi kerusakan.
- Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penampungan sementara.
 - Distribusi bantuan (hunian sementara, pangan dan sandang) Pada tahap awal, bantuan pangan berupa makanan siap-santap.
 - Pendirian dapur umum.
- Pemberian layanan air bersih, jamban dan sanitasi lainnya.
- Pemberian layanan kesehatan, perawatan dan rujukan.
- Pengoperasian peralatan
 - Mengoperasikan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan, termasuk alat-alat berat.
- Pengerahan sarana transportasi udara/laut
 - Dilakukan pada situasi/kondisi tertentu yang memerlukan kecepatan untuk penyelamatan korban bencana dan distribusi bantuan kepada masyarakat/korban bencana terisolasi.
- Koordinasi dan Komando
 - Setiap kejadian penting dilaporkan kepada POSKO

SATLAK PB/ SATKORLAK PB/BAKORNAS PB. Komando dilakukan oleh penanggungjawab (*Incident Commander*). Di tingkat nasional penanggungjawab adalah Kalakhar BAKORNAS PB, di tingkat Provinsi adalah Danrem dan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dandim.

- Penyampaian laporan perkembangan penanganan bencana ke media massa melalui POSKO SATLAK PB dan SATKORLAK PB.

5.4. Pemulihan Darurat, dengan kegiatan:

- Mengembalikan sarana/prasarana vital dapat berfungsi normal agar masyarakat dapat beraktivitas kembali.
- Evaluasi penanganan darurat dan pernyataan tanggap darurat selesai.

Kegiatan, pelaku dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam kedaruratan, sebagaimana **Lampiran II**.

VI. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA

6.1. Kebutuhan Sumberdaya

Kebutuhan sumber daya untuk menanggulangi bencana banjir di 24 Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan "berat", sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III Kolom 3**.

6.2. Pengerahan Sumber Daya Sektoral

Masing-masing instansi penanggung jawab sektor mengerahkan sumberdaya yang ada di bawah lingkup kewenangannya, baik sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun non-pemerintah. Pengerahan dilakukan sejak tahap kesiapsiagaan sampai dengan pemulihan darurat.

Besarnya sumber-daya yang dimiliki oleh setiap instansi, sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III Kolom 5**.

6.3. Dukungan BAKORNAS PB

Untuk mendukung pengerahan sumberdaya tersebut, BAKORNAS PB akan memback-up instansi / penanggung jawab sektor dalam penanganan bencana, termasuk pendanaan sejak tahap kesiapsiagaan sampai dengan pemulihan darurat.

Tanggung jawab pasca-bencana (setelah pemulihan darurat), dikembalikan kepada masing-masing instansi sektor terkait.

6.4. Rencana Biaya

Untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana banjir tahun 2008, diperlukan dana sebesar **Rp 150.000.000.000,-** yang akan diupayakan melalui APBN tahun 2007-2008 dengan peruntukan kesiapsiagaan, dukungan operasional tanggap darurat dan Kesekretariatan Posko, dengan peruntukan:

- Kesiapsiagaan
- POSKO.
- Tanggap Darurat
- Pemulihan Darurat

VII. KOORDINASI DAN RENCANA PELAKSANAAN

7.1. Tingkat Pusat

BAKORNAS PB

- Memobilisasi sumber daya nasional untuk penanggulangan bencana/kedaruratan sejak kesiapsiagaan hingga penanganan darurat selesai.

Departemen PU

- Menyediakan peta lokasi rawan banjir bekerjasama dengan BAKOSURTANAL.
- Menyediakan sarana dan prasarana pada tahap kesiapsiagaan dan penanganan bencana/kedaruratan hingga pemulihan darurat.

Departemen Perhubungan

- Memantau jalur-jalur transportasi yang terhambat akibat banjir dan melaksanakan upaya-upaya alternatif transportasi.
- Melaporkan dan memberikan informasi kondisi cuaca secara berkala/terus-menerus.
- Menyediakan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan bencana/kedaruratan.

Departemen Kesehatan

- Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di lokasi bencana.

- Mencatat jumlah masyarakat/korban meninggal, luka-luka dan korban terserang penyakit akibat bencana.
- Melakukan upaya penanganan krisis kesehatan yang meliputi : pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan, Puskesmas, Pustu, RS rujukan. dll.

Departemen Sosial

- Menyiapkan bahan kebutuhan pokok sejak tahap kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.
- Mendistribusikan bahan kebutuhan pokok bagi korban bencana/pengungsi sampai dengan tanggap darurat selesai.
- Mengupayakan tersedianya bahan kebutuhan pokok dari berbagai sumber.

Departemen Dalam Negeri

- Mengkoordinasikan Pemerintah Daerah untuk upaya pengendalian bencana banjir sejak kesiapsiagaan sampai dengan tanggap darurat selesai.
- Menjembatani tugas Instansi teknis Pusat, Instansi teknis Pusat yang ada di Daerah dan Instansi Daerah.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

- Menyediakan informasi dan prakiraan cuaca dan iklim yang berkaitan dengan banjir .

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

- Mengembangkan teknologi Peringatan Dini.

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)

- Menyediakan peta-peta daerah rawan bencana banjir.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

- Melakukan kajian dari citra satelit dan analisis tentang prediksi kondisi cuaca berdasarkan data dari citra satelit.

Tentara Nasional Indonesia

- Mengerahkan potensi sumberdaya (peralatan dan personil) TNI untuk melakukan penanganan bencana banjir, termasuk kemungkinan penggunaan helicopter untuk evakuasi dan distribusi bantuan, jika diperlukan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Mengendalikan situasi keamanan sejak kesiapsiagaan hingga tanggap darurat selesai.

Badan SAR Nasional (BASARNAS)

- Melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan/evakuasi korban bencana.

7.2. Tingkat Provinsi

- Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB menunjuk Komandan Penanganan Darurat (Incident Commander) untuk mengendalikan operasi lintas Kabupaten/Kota.
- Komandan Penanganan Darurat bertugas:
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengendalian bencana banjir.
 - Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana.
 - Membuka POSKO di lapangan dan mengaktifkan Ruang POSKO Crisis Centre.
 - Memberlakukan Rencana Operasi sebagai Perintah Operasi Tanggap Darurat dalam rangka penanggulangan bencana.
 - Melaporkan tindakan yang telah diambil serta saran-saran kepada Gubernur serta Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar BAKORNAS PB melalui POSKO Crisis Centre.
- Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait.

Dalam pelaksanaan tugas SATKORLAK PB didukung oleh instansi Teknis/Dinas/lembaga tingkat Provinsi antara lain :

 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Sosial
 - Dinas PU
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Kebersihan
 - Badan Kesbang Linmas / lembaga terkait.
- Instansi Teknis Pusat yang berada di Provinsi
Pelaksanaan tugas Satkorlak PB berserta unsur teknis dalam penanganan bencana banjir juga didukung oleh Instansi Teknis Pusat yaitu :
 - BMG
 - TNI (Kodam / Korem)
 - Kepolisian (POLDA)
 - BASARNAS (SAR)

- Unsur Masyarakat

Unsur masyarakat yang dapat berperan-serta dalam upaya penanggulangan bencana banjir sejak kesiapsiagaan sampai dengan tanggap darurat selesai, antara lain:

- Palang Merah Indonesia
- Pramuka
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Unsur-unsur lain.

7.3. Tingkat Kabupaten/Kota

- Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PB menunjuk Komandan Penanganan Darurat (Incident Commander) untuk mengendalikan operasi.
- Komandan Penanganan Darurat mempunyai tugas :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir.
 - Menyusun perencanaan dan kesiapsiagaan daerah berdasarkan tingkat kerawanan bencana
 - Membuka POSKO di lapangan dan mengaktifkan Ruang Posko Crisis Centre
 - Memberlakukan Rencana Operasi menjadi Perintah Operasi Tanggap Darurat.
 - Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta saran-saran kepada Ketua SATLAK PB yang tembusannya disampaikan kepada Ketua SATKORLAK PB dan Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar BAKORNAS PB melalui Posko Crisis Centre.

7.4. Unsur Teknis dari Dinas atau Badan terkait

Dalam pelaksanaan tugas Satlak PB didukung oleh instansi Teknis/Dinas/lembaga tingkat Kabupaten/ Kota antara lain :

- Dinas Kesehatan
- Dinas PU
- Dinas Sosial
- Dinas Kebersihan
- Badan Kesbang Linmas/lembaga terkait.

7.5. Instansi Teknis Pusat di Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan tugas SATLAK PB beserta unsur teknis dalam penanggulangan banjir juga didukung oleh Instansi Teknis Pusat antara lain :

- BMG
- TNI (KODIM)
- Kepolisian (POLRES)
- BASARNAS (SAR)

7.6. Unsur Masyarakat

Unsur masyarakat yang dapat berperan serta dalam upaya pengurangan banjir sejak kesiapsiagaan sampai tanggap darurat selesai, antara lain :

- PMI
- Pramuka
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- RAPI, ORARI
- Organisasi/pihak-pihak lain.

VIII. PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

8.1. Dalam hal terjadi bencana

- Rencana Kontinjensi ini diberlakukan sebagai *Rencana Operasi Tanggap Darurat* dengan melakukan *kajian cepat* ke lokasi bencana.
- Rencana Kontinjensi berlaku hingga musim penghujan berakhir (awal bulan Maret 2008).
- Pola penanganan/pengorganisasian didasarkan pada sistem operasi *Incident Command System (ICS)*.
- Hal-hal yang tidak/belum terakomodasikan dalam Rencana Kontinjensi ini, secara otomatis dilaksanakan oleh masing-masing sektor beserta semua pihak yang terlibat di dalamnya.
- Semua pihak dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah diharapkan berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana banjir.
- Pengakhiran masa berlaku Rencana Kontinjensi didahului dengan pernyataan resmi tentang selesainya penanganan darurat.

8.2. Dalam hal tidak terjadi bencana

- Jika musim penghujan telah berakhir dan tidak ada lagi potensi bencana banjir, maka Rencana Kontinjensi dapat dinyatakan *tidak berlaku lagi* dan posisi sumberdaya yang telah di-*plot* dalam Rencana Kontinjensi kembali ke asal/posisi semula di masing-masing sektor/instansi.
- Dilakukan pemutakhiran/validasi data dan sumber daya melalui pertemuan berkala dengan sektor-sektor terkait untuk menghadapi ancaman banjir pada tahun berikutnya.
- Tahapan kegiatan rencana tindak lanjut :



IX. PENUTUP

Rencana Kontinjensi ini disusun dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir di 24 Kabupaten di 10 Provinsi tahun 2007/2008 dan diberlakukan sampai dengan Minggu ke-I bulan Maret 2008 (berakhirnya musim penghujan).

KEGIATAN DALAM KEDARURATAN

No.	Kegiatan	Pelaku/Unsur	Waktu Pelaksanaan
I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Kesiapsiagaan 1. Pemantauan cuaca 2. Pemantauan debit air sungai 3. Pengamatan peringatan dini 4. Penyebaran informasi 5. Inventarisasi kesiapsiagaan 6. Penyiapan peta rawan banjir 7. Penyiapan sumberdaya 8. Penyiapan alat-alat berat dan bahan banjir 9. Penyiapan pompa air, mobil tangki air dan mobil tinja 10. Penyiapan tenaga medis/paramedis dan ambulance 11. Penyiapan jalur evakuasi dan lokai penampungan sementara 12. Penyiapan keamanan	BMG Satlak/Satkorlak PB/PU Satlak/Satkorlak PB/PU Satlak/Satkorlak PB/PU Satlak/Satkorlak PB/PU Dinas PU Satlak/Satkorlak/Sektor Dinas PU Dinas PU Dinas Kesehatan Dins PU / Kebersihan POLRI/TNI	Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana Pra-bencana
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Tanggap /Darurat 1. Pendirian POSKO 2. Pengerahan Tim Reaksi Cepat 3. Pemenuhan kebutuhan dasar di penampungan sementara 4. Pemberian layanan air bersih, jamban dan sanitasi 5. Pemberian layanan kesehatan, perawatan dan rujukan 6. Pengoperasian alat-alat berat 7. Pengerahan sarana transportasi udara/laut 8. Koordinasi dan Komando (Satlak/Satkorlak PB/Bakornas PB) 9. Pelaporan	Satlak/Satkorlak PB Satlak/Satkorlak PB Satlak/Satkorlak PB/Sektor terkait Dinas PU Dinas Kesehatan Dinas PU Dinas Perhubungan Satlak/Satkorlak PB Satlak/Satkorlak PB	Sesaat setelah kejadian Sesaat setelah kejadian Sesaat setelah kejadian Selama masa darurat Selama masa darurat Selama masa darurat Selama masa darurat Selama masa darurat Setiap saat selama darurat
III. 1. 2.	Pemulihan Darurat 1. Memfungsikan kembali sarana/prasarana vital. 2. Evaluasi penanganan darurat dan pernyataan resmi pengakhiran darurat.	Dinas PU Satlak/Satkorlak PB	Selama masa darurat Akhir tanggap darurat.

**PROYEKSI KEBUTUHAN
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BANJIR TAHUN 2007-2008**

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
I.	LAKHAR BAKORNAS PB					
1.	Perahu karet W.330	24	unit	3	21	
2.	Perahu karet	24	unit	3	21	
3.	Perahu karet Inggris & mesin	24	unit	4	20	
4.	Perahu karet Korea:					
	~ Kapasitas 12 org	12	unit	6	6	
	~ Kapasitas 10 org	18	unit	13	5	
	~ Kapasitas 8 org	48	unit	24	24	
	~ Kapasitas 7 org	12	unit	6	6	
5.	Mesin perahu	8	unit	4	4	
6.	Perahu karet & mesin tempel	8	unit	4	4	
7.	Mesin Yanmar 15 PK	8	unit	3	5	
8.	Sepatu boot	480	pasang	290	190	
9.	Handy Talky	20	unit	3	17	
10.	Tenda regu standar militer	24	unit	5	19	
11.	Tenda pleton	48	unit	44	4	
12.	Gen. listrik & Tripot & Lampu sorot	12	unit	3	9	
13.	Masker	240	unit	100	140	
14.	Mantel	120	unit	100	20	
15.	Tandu	120	unit	50	70	
16.	Pelampung	1,200	unit	1,000	200	
17.	Senter	1,200	unit	560	640	
18.	Telepon satelit	10	unit	7	3	
19.	Instalasi penjernih air (IPA)	10	unit	6	4	
20.	Genset :					
	~ Kapasitas 10 Kva	10	unit	2	8	
	~ Kapasitas 6 Kva	48	unit	25	23	
21.	Pompa air	48	unit	30	18	
22.	Portable sanitation	24	unit	2	22	

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
II.	DEPARTEMEN SOSIAL					
1.	Lauk-pauk					Gudang Depsos
	Kecap manis	1,200	btl	37	1,163	
	Sambal pedas	2,400	btl	1,452	948	
	Minyak goreng	480	btl	236	244	
	Sardencis	7,200	kg	5,585	1,615	
2.	Sandang					Gudang Depsos
	Kain sarung	12,000	ptg	11,433	567	
	Kain batik panjang	960	ptg	500	460	
	Kaos kerah dewasa	4,800	ptg	4,200	600	
	Daster	10,000	ptg	9,700	300	
	Seragam SD laki-laki	4,800	ptg	4,454	346	
	Seragam SD perempuan	4,800	ptg	4,250	550	
	Handuk	4,800	ptg	3,924	876	
	Kemeja batik	4,800	ptg	3,260	1,540	
3.	Alat Dapur Keluarga					Gudang Depsos
	Teko aluminium	1,200	buah	600	600	
	Panci serba-guna / dandang	24,000	buah	21,426	2,574	
	Tempat nasi aluminium	1,200	buah	600	600	
	Centong nasi stainless	1,200	set	600	600	
	Wajan aluminium	1,200	buah	610	590	
	Sodet stainless	1,200	buah	610	590	
	Piring melamin	600	lusin	310	290	
	Gelas melamin	600	lusin	310	290	
4.	Family Kits					Gudang Depsos
	<i>Per paket :</i>	9,600	pkt	5,998	3,602	
	~ handuk					
	~ sabun mandi					
	~ sikat gigi					
	~ pasta gigi					
	~ cairan anti septic					
	~ pembalut wanita					
	~ shampoo					
	~ P3K					
	~ senter					
	~ tas darurat					
	~ tas packing					

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
5.	Food Ware					Gudang Depsos
	<i>Per paket:</i>	4,800	pkt	2,999	1,801	
	~ piring melamin					
	~ mug					
	~ sendok stainless					
	~ mangkok					
	~ termos					
	~ pisau					
	~ serbet					
	~ tempat nasi					
	~ tempat sayur					
	~ garpu stainless					
	~ tas packing					
6.	Tikar	480	lbr	16	464	Gudang Depsos
7.	Matras	240	lbr	2	238	Gudang Depsos
8.	Selimut	4,800	lbr	6,960	(2,160)	Gudang Depsos
9.	Evakuasi Kits					Gudang Depsos
	~ Tenda pleton	240	unit	149	91	
	~ Tenda keluarga	120	unit	33	87	
	~ Tenda regu	240	unit	143	97	
	~ Velbed aluminium	60	unit	15	45	
	~ Genset	96	unit	63	33	
	~ Alat dapur lapangan (Dumlap)	24	set	13	11	
	~ Water Closed Tenda Posko	10	unit	2	8	
	~ Jaket/rompi pelampung	3,600	set	3,146	454	
	~ Lampu sorot	24	unit	3	21	
	~ Alat komunikasi lengkap (SSB)	48	unit	36	12	
	~ Peralatan TAGANA	480	pkt	124	356	
	~ Mesin perahu karet/mesin tempel	48	unit	27	21	
	~ Perahu evakuasi / perahu Dolphin	24	unit	1	23	
	~ Trailer perahu evakuasi	24	unit	1	23	
10.	Mobil Siaga Bencana					
	~ Mobil Rescue Tactical Unit (RTU)	24	unit	14	10	
	~ Mobil dapur lapangan	40	unit	3	37	
	~ Mobil tangki air	48	unit	3	45	

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
III.	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (Dit Sungai, Danau dan Waduk)					
1.	Bronjong kawat	2,400,000	unit	2,133,750	266,250	
				5,000		BWS Sumatera V (Sumbar)
				7,000		BWS Sumatera VI (Jambi)
				10,950		BWS Sumatera VII (Bengkulu)
				8,000		BBWS Cidanau- Ciujung-Cidurian
				5,000		BBWS Citarum
				7,000		BBWS Cimanuk-Cisanggarung
				10,000		BBWS Bengawan Solo
				9,000		BBWS Pemali-Juana
				2,000		BWS Kalimantan II (Kalteng & Kalsel)
				1,000		BWS Kalimantan III (Kaltim)
				5,800		BWS Sulawesi I (Sulut & Gorontalo)
				19,000		BWS Pompongan-Jeneberang
				17,000		BWS Sulawesi III (Sulteng)
				5,000		BWS Nusa Tenggara I (NTB)
				9,000		BWS Nusa Tenggara II (NTT)
				3,500		BWS Maluku
				4,000		BWS Papua
				4,500		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
				1,000		Stock gudang PPRB Wil. Timur, Porong
2.	Karung Plastik	2,400,000	lbr	1,000,000	1,400,000	
				50,000		BWS Sumatera III (Riau)
				10,000		BWS Sumatera V (Sumbar)
				25,000		BWS Sumatera VI (Jambi)
				50,000		BWS Sumatera VIII (Sumsel)
				50,000		BBWS Citarum
				150,000		BBWS Cimanuk-Cisanggarung
				15,000		BBWS Bengawan Solo
				35,000		BBWS Pemali-Juana
				30,000		BWS Kalimantan II (Kalteng & Kalsel)
				130,000		BWS Kalimantan III (Kaltim)
				200,000		BWS Pompongan-Jeneberang
				50,000		BWS Sulawesi III (Sulteng)
				15,000		BWS Nusa Tenggara I (NTB)
				30,000		BWS Nusa Tenggara II (NTT)

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
				20,000		BWS Maluku
				40,000		BWS Papua
				50,000		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
				50,000		Stock gudang PPRB Wil. Timur, Porong
3.	Perahu karet	48	unit	29	19	
				2		BWS Sumatera III (Riau)
				2		BWS Sumatera VI (Jambi)
				2		BWS Sumatera VIII (Sumsel)
				4		BBWS Cidanau- Ciujung-Cidurian
				7		BBWS Ciliwung-Cisadane
				3		BBWS Bengawan Solo
				3		BBWS Pemali-Juana
				2		BWS Kalimantan II (Kalteng & Kalsel)
				4		BWS Kalimantan III (Kaltim)
				2		BWS Sulawesi I (Sulut & Gorontalo)
				49		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
4.	Mesin perahu	48	unit	40	8	
				2		BWS Sumatera VIII (Sumsel)
				1		BBWS Ciliwung-Cisadane
				2		BBWS Pemali-Juana
				2		BWS Kalimantan III (Kaltim)
				2		BWS Sulawesi I (Sulut & Gorontalo)
				31		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
5.	Pompa banjir	24	unit	7	17	
				1		BBWS Cidanau- Ciujung-Cidurian
				1		BBWS Citarum
				5		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
6.	Pompa Ø4"	240	unit	195	45	
				10		BBWS Cidanau- Ciujung-Cidurian
				10		BWS Sumatera VIII (Sumsel)
				2		BBWS Ciliwung-Cisadane
				30		BBWS Citarum
				10		BBWS Cimanuk-Cisanggarung
				10		BBWS Bengawan Solo
				20		BBWS Pemali-Juana

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
				103		Stock gudang Ditjen SDA Bekasi
7.	Pompa Ø 3"	48	unit	25	23	
				10		BWS Sumatera VIII (Sumsel)
				2		BBWS Ciliwung-Cisadane
				10		BBWS Citarum
				3		BBWS Cimanuk-Cisanggarung
IV.	DEPARTEMEN KESEHATAN					
1.	Ambulance (merk Mts L-200)	48	unit	24	24	
				1		DKPR Sumut
				1		DKPR Sumsel
				1		DKPR Jateng
				1		DKPR Jatim
				1		DKPR Bali
				1		DKPR Sulse
				1		DKPR Sulut
				1		DKPR Kalsel
				1		DKP Gorontalo
				1		DKPR DKI
				1		DKP Lampung
				1		DKP NTT
				1		DKP Maluku
				1		DKP Jabar
				1		DKP Sultra
				1		DKP Riau
				1		KKP Batam
				1		KKP Entikong
				1		DKP Jambi
				1		DKP Sumbar
				1		DKP Kaltim
				1		DKKab Muko-muko
				1		RS Muntilan
				1		DKPSR Papua

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
2.	Mobil Operasional (merk Mits L-200)	24	unit	9	15	
				1		DKPR Sulsel
				1		DKPR Jateng
				1		DKPR DKI
				1		DKPR Sumut
				1		DKPR Bali
				1		DKPR Jatim
				1		DKPR Sumsel
				1		DKPR Sulut
				1		DKPR Kalsel
3.	Mobil Klinik (merk Toyota Dyna)	24	unit	16	8	
				2		DKPR Sulsel
				2		DKPR Jateng
				2		DKPR Sumut
				2		DKPR Bali
				2		DKPR Jatim
				2		DKPR Sumsel
				2		DKPR Sulut
				2		DKPR Banjarmasin
4.	Perahu karet	48	unit	32	16	
				4		DKPR Medan
				2		DKPR Sulsel
				2		DKPR Sulteng
				3		DKPR Banjarmasin
				1		DKPR Muhammadiyah Gombong
				2		DKKb Kutai Barat
				3		DKPR Jateng
				2		DKPR Bali
				2		DKPR Jatim
				1		DKP Kalbar
				1		DKK Tangerang
				2		DK Kota Bekasi
				1		DKP Kalteng
				1		RSUD Pariaman
				1		KKP Batam
				1		KKP Makasar
				2		DKK Kutai Kartanegara
				1		Pusdokkes POLRI

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
5.	Motor tempel (merk Yamaha 25 PK)	48	unit	35	13	
				4		DKPR Medan
				2		DKP Sulteng
				2		DKPR Sulsel
				3		DKPR Banjarmasin
				1		DKPR Muhammadiyah Gombong
				2		dkkB Kutai Barat
				3		DKPR Jateng
				2		DKPR Bali
				2		DKPR Jatim
				2		DKPR Sumsel
				2		DKPR Sulut
				1		DKP Kalbar
				1		DKP Tangerang
				1		DK Kota Bekasi
				1		DKP Kalteng
				1		RSUD Pariaman
				1		KKP Batam
				1		KKP Makasar
				2		DKK Kutainegara
				1		Pusdokkes POLRI
6.	Life Jacket	240	buah	100	140	
				16		DKPR Medan
				8		DKP Sulteng
				8		DKPR KKB Kutai Barat
				12		DKPR Jateng
				8		DKPR Bali
				8		DKPR Jatim
				8		DKPR Sumsel
				8		DKPR Sulut
				8		DKPR Sulsel
				8		DKPR Kutai Kartanegara
				4		RSUD Pariaman
				8		DK Kota Bekasi
				8		DKK Tangerang
				4		DKP Kalbar

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
7.	Water purifier (with RO)	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
8.	Motor URC + Aikes	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
9.	Oksigen concentrator medical P-6000 SM	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
10.	Tabung oksigen 5000 ml GEA type 6-M3	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
11.	Sunction pump "Cheiron type Victoria"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
12.	Anesthesia mesin dan ventilator "JB Tech"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
13.	Autoclave sterilisator kering Fazizini RT. 40	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
14.	ECG monitor "GE Health-care mac 500"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
15.	Vacum ekstrator "Fazzini F-90"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
16.	Laryngoscope set adult +m infant "Tekno medical"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
17.	Tenda Komando					1 RSUD Pariaman 1 DKK Kutai Kertanegara 1 RSUD Koja 1 DKK Sukabumi 2 DKP Sumbar
18.	Electro surgery "Tekno medical tom 401"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
19.	Orthopedik set "Tekno medical"	48	unit	36	12	9 regional @ 4 unit
20.	Minor surgery "Weinmann"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
21.	Ventilator anak "Weinmann WM 8215"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
22.	Ventilator dewasa "Weinmann"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
23.	Bateray prtabel X-ray + standing "Poskom PXM 40 BT"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 DKP Irian Jaya
24.	Emergency kits "Akma Am 5001"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit; 1 DKP Irian Jaya
25.	Mesin cuci 10 kg "LG"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
26.	Kompor gas 4 tungku "Modena FC-3100"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
27.	Tabung gas 15 kg	96	unit	27	69	9 regional @ 3 unit
28.	Piring melamin	960	buah	900	60	9 regional @ 100 buah
29.	Gelas melamin	960	buah	900	60	9 regional @ 100 buah
30.	Sendok	960	buah	900	60	9 regional @ 100 buah
31.	Garpu	960	buah	900	60	9 regional @ 100 buah

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
32.	Pisau stainless	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
33.	Talenan	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
34.	Cobek	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
35.	Centong	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
36.	Teko	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
37.	Mangkuk melamin	960	buah	900	60	9 regional @ 100 buah
38.	Piring makan pasien	960	buah	450	510	9 regional @ 50 buah
39.	Dispenser hot & cold	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
40.	Panci	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
41.	Wajan stainless	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
42.	Magic jar	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
43.	Termos	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
44.	Mist blow "Tasco"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
45.	Fogging machine "Aerofog"	48	buah	27	21	9 regional @ 3 buah 2 DPR RI
46.	HP Satelite "Ericson R-100"	24	buah	18	6	9 regional @ 2 buah
47.	Handy Talky "motorolla GP-2000"	480	unit	270	210	9 regional @ 30 unit 5 DKK Morowali, Sultengah RSUD Dr. RD Kandou
48.	Lap-top "Acer"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
49.	Printer "Canon IP-2200"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
50.	Handy camera "JVC"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
51.	Camera digital "Olympus FE-190"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
52.	Velt bed	480	unit	450	30	9 regional @ 50 unit 5 dkkB Kutai Barat 25 DKK Sukabumi 100 RSUD Kojas 150 DKP Sumbar
53.	Tandu lipat	240	unit	90	150	9 regional @ 10 unit
54.	Personal kits	240	unit	90	150	9 regional @ 10 unit
55.	Sepatu Boot	2,400	unit	1,800	600	9 regional @ 200 unit
56.	Sarung tangan	240	unit	225	15	9 regional @ 25 unit
57.	inflatable tent "Weinmann"	48	set	36	12	9 regional @ 4 set
58.	Tenda balon	96	unit	90	6	9 regional @ 10 unit
59.	AC Standing "Auxillary" 2 PK	48	unit	18	30	9 regional @ 2 unit
60.	AC Standing "TCL/Auxiliary" 2 PK	48	unit	18	30	9 regional @ 2 unit

No.	Jenis Sumberdaya	Kebutuhan		Ketersediaan	Kesenjangan	Lokasi Ketersediaan Sumberdaya
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7
61.	Mayor Surgery "Tekno medical"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit 1 SKP Irian Jaya
62.	Refrigerator Vaksin "Vestfrost"	24	unit	18	6	9 regional @ 2 unit
63.	Lampu operasi (ceiling type) "GEA type L-735"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
64.	Generator Set 35 KV "Deuzt kuning"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
65.	Generator Set 35 KVA "Deuzt putih"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
66.	Generator Set 5000 W "Yamaha"	24	unit	9	15	9 regional @ 1 unit
V.	LAIN-LAIN					
1.	Buku Renkon Banjir 2007-2008	1,200	buku	1,200	-	
2.	Posko lapangan	10	Posko	10	-	Aktivasi Pusdalops.
3.	Perjalanan	120	O/H	-	120	
4.	Alat Tulis Kantor	10	pkt	-	10	

KETERANGAN :

9 regional :

- ~ Sumatera Utara
- ~ Sumatera Selatan
- ~ DKI Jakarta
- ~ Jawa Tengah
- ~ Jawa Timur
- ~ Bali
- ~ Kalimantan Selatan
- ~ Sulawesi Selatan
- ~ Sulawesi Utara

DKP = Dinas Kesehatan Provinsi

DKK = Dinas Kesehatan Kabupaten

DKPR = Dinas Kesehatan Provinsi Regional



**RENCANA OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
TAHUN 2007/2008**

PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB
Jakarta, 2007

RENCANA OPERASI NOMOR 2/2007

PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

I. DASAR

Direktif Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Pelaksana Harian Bakornas PB pada tanggal 26 Desember 2006 agar :

1. Melakukan upaya pencarian korban bencana yang dilaporkan hilang,
2. Melakukan perawatan dan pelayanan terhadap pengungsi dengan memberikan :
 - makanan
 - kesehatan dan obat-obatan
 - air bersih dan sanitasi
 - tenda dan tempat penampungan
3. Mengerahkan seluruh sumber daya dan logistik yang ada termasuk :
 - pesawat dan helikopter TNI
 - kapal-kapal TNI AL untuk Re-supply
 - perahu karet.
4. Mengerahkan personil-personil TNI, PMI, dan Unsur-Unsur lain dan dikoordinasikan dengan baik.
5. Memperbaiki (relief operation) infrastruktur utama seperti tanggul, jalan dan listrik.
6. menggunakan dana Pemerintah Pusat (c/q Bakornas PB) dengan cepat dan tepat, serta akuntabel,
7. Mengkomunikasikan melalui pers berupa pemberitaan yang akurat dan tidak menimbulkan kepanikan.

II. SITUASI

Berdasarkan data daerah yang berpotensi rawan banjir bulan Nopember dan Desember 2007 tersebut diatas, skenario/asumsi bencana banjir ditetapkan sebagai berikut:

1. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Desember 2007, Januari 2008 dan Februari 2008 dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember 2007 dan Januari 2008.
2. Dari tingkat potensi banjir tinggi, menengah dan rendah, dipilih tingkat potensi tinggi dengan asumsi
3. 90% dari 90 Kabupaten/Kota atau 81 Kabupaten/Kota di 27 Provinsi pada bulan Desember 2007 s/d Februari 2008 terjadi di wilayah Indonesia, sebagian besar adalah Indonesia bagian barat.

4. Dari 81 Kabupaten/Kota tersebut, 30%-nya yaitu 24 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi akan benar-benar terjadi banjir dengan dampak tingkat kerusakan berat.
5. Dampak bencana banjir akan terjadi pada beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. Penduduk, berupa korban jiwa meninggal, luka-luka, wabah sakit, hilang, pengungsian, pindah tempat dan terisolasi.
 - b. Pemerintahan, antara lain kehancuran atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan dan perlengkapan kantor.
 - c. Ekonomi, antara lain hilangnya mata pencaharian, tidak berfungsinya pasar tradisional, rusaknya lahan pertanian/persawahan, hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya perekonomian.
 - d. Sarana/Prasarana, antara lain berupa kerusakan jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.
 - e. Lingkungan, antara lain berupa kerusakan obyek wisata, ekosistem, dan tanggul/jaringan irigasi.

Kebijakan Pemerintah

- 1) Penanganan bencana Banjir tahun 2007/2008 dilakukan oleh berbagai unsur dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, masyarakat terlatih, serta unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Pelaksana Harian BAKORNAS PB.
- 2) Sebagai langkah antisipasi/ kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir di 24 Kabupaten, diperlukan kerja keras dari semua komponen untuk secara bersama-sama melaksanakan upaya-upaya sinergis dan terintegrasi.

III. TUGAS POKOK

Pelaksana Harian BAKORNAS PB beserta unsur instansi yang mendukung secara terkoordinasi melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir mulai hari H (1 November 2007) sampai dengan selesai (diperkirakan awal Maret 2008) di 24 KABUPATEN daerah rawan banjir.

IV. INSTANSI YANG TERLIBAT

A. PELAKSANA HARIAN BAKORNAS PB PB meliputi :

- Pelaksana Harian Pelaksana Harian Bakornas PB
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Kesehatan
- Departemen Perhubungan
- Basarnas
- Departemen Kominfo
- Bakosurtanal
- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Sosial
- Mabes TNI
- Mabes POLRI
- BMG
- BPPT
- LAPAN

B. SATKORLAK PB meliputi 10 Provinsi

V. PELAKSANAAN

a. Konsep Operasi

- 1) Operasi penanganan bencana banjir dilaksanakan pada 2 (dua) tahap yaitu tahap kesiapsiagaan sampai dengan tahap tanggap darurat
- 2) Pada tahap kesiapsiagaan, operasi dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat pencegahan dan kesiapan yang dimulai dari kesiapan posko, kesiapan alat peralatan, kesiapan sumberdaya daerah, penyiapan sistem peringatan dini dan penyuluhan-penyuluhan meliputi :
 - Pembentukan “Kelompok Kerja” (POKJA) yang beranggotakan dinas-instansi terkait (diketuai Dinas Pengairan/Sumber Daya Air).
 - Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sehingga dapat berfungsi sebagaimana direncanakan.
 - Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir.

- Menyiapkan peta daerah rawan banjir dilengkapi dengan “plotting” rute pengungsian, lokasi pengungsian sementara, lokasi POSKO, dan lokasi pos pengamat debit banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir.
- Mengecek dan menguji sarana sistim peringatan dini yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memeliharanya dan membentuknya jika belum tersedia dengan sarana yang paling sederhana sekalipun.
- Melaksanakan perencanaan logistik dan penyediaan dana, peralatan dan material yang diperlukan untuk kegiatan/upaya tanggap darurat, diantaranya dana persediaan tanggap darurat; persediaan bahan pangan dan air minum; peralatan penanggulangan (misalnya: movable pump, dump truck, dan lain-lain); material penanggulangan (misalnya kantong pasir, terucuk kayu/bambu, dan lain-lain); dan peralatan penyelamatan (seperti perahu karet, pelampung, dan lain-lain).
- Perencanaan dan penyiapan SOP (Standard Operation Procedure)/Prosedur Operasi Standar untuk kegiatan/tahap tanggap darurat yang melibatkan semua anggota SATKORLAK, SATLAK dan POSKO diantaranya identifikasi daerah rawan banjir, identifikasi rute evakuasi, penyediaan peralatan evakuasi (alat transportasi, perahu, dan lain-lain), identifikasi dan penyiapan tempat pengungsian sementara seperti peralatan sanitasi mobile, penyediaan air minum, bahan pangan, peralatan dapur umum, obat-obatan dan tenda darurat.
- Pelaksanaan Sistem Informasi Banjir, dengan diseminasi langsung kepada masyarakat dan penerbitan press release/penjelasan kepada press dan penyebar luasan informasi tentang banjir melalui media masa cetak maupun elektronik yaitu station TV dan station radio.
- Melaksanakan pelatihan evakuasi untuk mengecek kesiapan masyarakat, SATLAK dan peralatan evakuasi, dan kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapannya.
- Mengadakan rapat-rapat koordinasi di tingkat BAKORNAS, SATKORLAK, SATLAK, dan POKJA Antar Dinas/instansi untuk menentukan beberapa tingkat dari risiko bencana banjir berikut konsekuensinya dan pembagian peran diantara instansi yang terkait, serta pengenalan/diseminasi kepada seluruh anggota SATKORLAK, SATLAK, dan POSKO atas SOP dalam kondisi darurat dan untuk menyepakati format dan prosedur arus informasi/laporan.

- Membentuk jaringan lintas instansi/sector dan LSM yang bergerak dibidang kepedulian terhadap bencana serta dengan media masa baik cetak maupun elektronik (stasion TV dan radio) untuk mengadakan kampanye peduli bencana kepada masyarakat termasuk penyaluran informasi tentang bencana banjir.
- Melaksanakan pendidikan masyarakat atas pemetaan ancaman banjir dan risiko yang terkait serta penggunaan material bangunan yang tahan air/banjir.
- Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir.
- Peranserta Masyarakat

Masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan dapat berperan aktif dalam :

- tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai, saluran dan sistem drainase;
- tidak membangun jembatan dan atau bangunan yang menghalangi atau mempersempit palung aliran sungai;
- tidak tinggal dalam bantaran sungai;
- tidak menggunakan dataran retensi banjir untuk permukiman atau untuk hal-hal lain diluar rencana peruntukannya;
- menghentikan penggundulan hutan di daerah tangkapan air,
- menghentikan praktek pertanian dan penggunaan lahan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah; dan
- ikut mengendalikan laju urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
- Aspek partisipatif, dalam hal ini partisipasi atau kontribusi dari masyarakat dapat mengurangi dampak bencana banjir yang akan diderita oleh masyarakat sendiri, partisipasi yang diharapkan mencakup:
 - ikut serta dan aktif dalam latihan-latihan (gladi) upaya mitigasi bencana banjir misalnya kampanye peduli bencana, latihan kesiapan penanggulangan banjir dan evakuasi, latihan peringatan dini banjir dan sebagainya;
 - ikut serta dan aktif dalam program desain & pembangunan rumah tahan banjir antara lain rumah tingkat, penggunaan material yang tahan air dan gerusan air;

- ikut serta dalam pendidikan publik yang terkait dengan upaya mitigasi bencana banjir;
- ikut serta dalam setiap tahapan konsultasi publik yang terkait dengan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan upaya mitigasi bencana banjir;
- melaksanakan pola dan waktu tanam yang mengadaptasi pola dan kondisi banjir setempat untuk mengurangi kerugian usaha dan lahan pertanian dari banjir; dan
- mengadakan gotong-royong pembersihan saluran drainase yang ada dilingkungannya masing-masing.
- Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut :
 - Pencegahan dengan langkah-langkah antara lain penyuluhan dan sosialisasi harus dilaksanakan secara luas, menyangkut persiapan saluran / selokan agar air lebih lancar mengalir.
 - Perlu terus diupayakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan proses hukum dibidang kebakaran hutan dan lahan dengan dukungan penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan pedoman-pedoman teknisnya.
 - Kerjasama dan bantuan Internasional dalam penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut :
 - Tidak membebani keuangan negara
 - Sejauh mungkin memanfaatkan tenaga ahli Indonesia
 - Mematuhi hukum dan peraturan Indonesia
 - Menghargai kebiasaan dan tradisi setempat
- 3) Pada tahap tanggap darurat operasi dititikberatkan pada kegiatan penyelamatan korban dan evakuasi.
- 4) Daerah sasaran meliputi 24 Propinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

b. Pada Tahap Kesiapsiagaan

Pada tahap kesiapsiagaan, Pelaksana Harian BAKORNAS PB, Satkorlak PB dan Satlak PB beserta unsur-unsur pendukung terkait, melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksana Harian Bakornas PB

Merumuskan, menetapkan kebijakan umum dan mengkoordinasikan operasi penanggulangan banjir di 24 Kabupaten (10 Provinsi)

- a) NAD
- b) Riau
- c) Jambi
- d) Banten
- e) Sumatera Selatan
- f) Sulawesi Selatan
- g) Kalimantan Selatan
- h) Jawa Barat
- i) Jawa Tengah
- j) Jawa Timur

2) Departemen Dalam Negeri

Menyiapkan pengerahan aparat dan masyarakat sumberdaya daerah untuk 24 Kabupaten

3) Departemen Kesehatan

Menyiapkan rencana penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan banjir

4) Departemen Perhubungan

Menyiapkan sarana perhubungan guna membantu upaya penanganan bencana banjir.

5) Departemen Komunikasi dan Informatika

Memberikan layanan informasi secara luas dan proaktif sesuai kegiatan penanganan bencana banjir

6) TNI

Menyiapkan peralatan berat dan pesawat termasuk helikopter dan dukungan personil untuk melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan korban; atas permintaan.

7) POLRI

- a) Menyiapkan dukungan Pol Air atau Polisi Airud dan personil POLRI untuk mendukung pencarian dan penyelamatan korban
- b) Membantu pengamanan rumah yang ditinggal kosong

8) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

- a) Menyiapkan data informasi dan perkiraan cuaca serta iklim yang berkaitan dengan hujan dan arah angin
- b) Menyiapkan penguatan Sistem Peringatan Dini antisipasi bencana banjir.

9) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Menyiapkan penguatan Sistem Peringatan Dini antisipasi bencana banjir

10) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

- a) Melakukan kajian dan analisis tentang prediksi kondisi cuaca
- b) Menyiapkan penguatan Sistem Peringatan Dini antisipasi banjir

11) Satkorlak PB

- a) Membuka posko kesiapsiagaan Penanggulangan bencana banjir
- b) Mengendalikan instansi terkait sebagai pendukung dalam menanggulangi bencana banjir
- c) Menyiapkan pengerahan aparat dan sumberdaya daerah
- d) Melaksanakan kampanye dan sosialisasi pengendalian bencana banjir
- e) Membuka media centre di posko Penanganan Darurat Bencana Banjir
- f) Melaksanakan evaluasi kegiatan setiap hari

c. Pada Tahap Tanggap Darurat

1) Pelaksana Harian Pelaksana Harian Bakornas PB

- a) Mengaktifkan Ruang Crisis Centre dari mulai Ruang Routine, Ruang Crisis I, Ruang Crisis II dan Ruang Meeting serta membuka posko di lapangan.
- b) Memerintahkan kepada instansi terkait untuk mengirimkan 1 (satu) personil siaga di Ruang Meeting Crisis Centre
- c) Memantau situasi lapangan secara intensif melalui Ruang Crisis Centre
- d) Mengirimkan Tim Pelaksana Harian BAKORNAS PB ke sasaran untuk membuka Posko, sesuai tingkatan bencana
- e) Segera mengirimkan bantuan teknik dan bantuan administrasi secara cepat, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai laporan dari Satkorlak PB maupun dari Tim

Pelaksana Harian BAKORNAS PB PB yang berada di lapangan.

- f) Menyiapkan Press Release setiap hari untuk disiarkan di Media Elektronik maupun Media Cetak
 - g) Menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan administrasinya.
 - h) Menerima laporan dari Satkorlak PB / Tim Pelaksana Harian BAKORNAS PB, menganalisa dan melaporkan kepada Ketua Pelaksana Harian BAKORNAS PB setiap pukul 19.00 wib
- 2) Departemen Dalam Negeri**
- a) Mengirimkan 1 (satu) personil sebagai penghubung (Liasion) di Ruang Meeting Crisis Centre Pelaksana Harian BAKORNAS PB
 - b) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang penanganan bencana banjir dengan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- 3) Departemen Kesehatan**
- a) Memberikan supervisi, bantuan teknis dan administrasi tentang penanganan kesehatan di daerah sasaran
 - b) Mencatat jumlah masyarakat yang terserang penyakit, seperti diare, penyakit kulit dan lain-lain.
 - c) Memberikan bantuan dokter, perawatan dan obat-obatan
- 4) Departemen Perhubungan**
- Memonitor jalur-jalur transportasi yang terhambat akibat banjir dan melaksanakan upaya-upaya alternatif transportasi
- 5) Departemen Komunikasi dan Informatika**
- Memberikan layanan informasi secara luas dan proaktif sesuai kegiatan penanganan bencana banjir
- 6) TNI**
- a) Memberikan bantuan pesawat angkut dan pesawat Helly sesuai kebutuhan atas permintaan
 - b) Memberikan dukungan fasilitas dan pengerahan sumberdaya militer untuk operasi tanggap darurat
 - c) Melaporkan tindakan yang telah diambil dan upaya serta saran-saran kepada Ketua Pelaksana Harian BAKORNAS PB Cq Kalakhar Pelaksana Harian BAKORNAS PB melalui Posko Crisis Centre.

7) POLRI

Memberikan dukungan fasilitas dan dukungan sumberdaya untuk membantu operasi tanggap darurat.

8) Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Memprediksi cuaca dan arah angin dan menyampaikan hasilnya ke Posko BAKORNAS PB

9) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Melaksanakan analisis cuaca dan mengembangkan cara-cara penanggulangan banjir.

10) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

- a) Memprediksi cuaca dan mengirim informasi ke BAKORNAS PB
- b) Mengaktifkan Early Warning System (EWS) beserta kegiatan monitoring

11) Satkorlak PB

- a) Menyusun organisasi di lapangan sesuai lampiran
- b) Mengaktifkan Posko Crisis Centre
- c) Mengendalikan instansi terkait sebagai pendukung dalam menanggulangi bencana banjir
- d) Membuka media centre
- e) Melaksanakan Conference Press setiap pukul 16.30 wib
- f) Melaksanakan evaluasi kegiatan kegiatan setiap hari

12) Tim Teknis Pelaksana Harian BAKORNAS PB

- a) Memberikan pendampingan dan asistensi kepada Gubernur di bidang teknis, administrasi, peralatan, serta dana sesuai kebutuhann
- b) Melaporkan setiap perkembangan kepada Kalakhar Pelaksana Harian Bakornas PB

13) Instruksi Koordinasi

- a) Susunan tugas berlaku mulai hari "H" Jam "J"
- b) Hari "H" Jam "J" mulai tanggal 1 Desember 2007.
- c) Operasi Penanggulangan Banjir dilakukan secara komplementer dengan mengintegrasikan seluruh unsur.
- d) Memanfaatkan segenap potensi yang ada dari masyarakat, swasta, LSM dan organisasi masyarakat lainnya dalam satu kerangka koordinasi yang terpadu.
- e) Perhatikan keamanan personil dan materil selama pelaksanaan tugas

- f) Adakan pengawasan dan evaluasi pada setiap kegiatan/akhir kegiatan
- g) Laporkan setiap perkembangan di lapangan dan laporan harian pada pukul 17.00 wib kepada Ketua BAKORNAS PB Cq Kalakhar BAKORNAS PB

VI. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

a. Administrasi

- 1) Personil yang terlibat sesuai dengan susunan tugas
- 2) Gunakan personil dan peralatan semaksimal mungkin sesuai dengan kualifikasi
- 3) Dukungan Administrasi dan keuangan bagi penanganan bencana banjir dilakukan secara berjenjang oleh Daerah, didukung pusat yang dialokasikan melalui dana cadangan
- 4) Penggunaan dana dilakukan secara tepat dengan memperhatikan azas akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Logistik

Dukungan logistik dilakukan dengan penerahan sumberdaya dan logistik yang dialokasikan melalui sektor-sektor terkait yang telah dibagi dalam perwilayahan.

VII. KOMANDO DAN PENGENDALIAN

a. Komunikasi

- 1) Gunakan sarana informasi dan komunikasi yang ada seperti sarana internet, faximili, telepon kabel dan telepon satelit, serta radio komunikasi.
- 2) Laksanakan prosedur komunikasi sesuai ketentuan

b. Komando

- 1) Fungsi komando oleh Pelaksana Harian BAKORNAS PB terhadap instansi terkait, berlaku pada saat Tahap Tanggap Darurat
- 2) Crisis Centre Pelaksana Harian BAKORNAS PB berada di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, dengan nomor telepon 021. 3458400 dan nomor fax 021 3458500.

KETUA : GUBERNUR
WAKIL KETUA : PANGDAM/DANREM
WAKIL KETUA : KAPOLDA

BAKORNAS PB

LIASION

- DEP. DALAM NEGERI
- DEP. SOSIAL
- DEP. KESEHATAN
- DEP. PEKERJAAN UMUM
- TNI/POLRI
- PMI
- BASARNAS

HUMAS

SEKRETARIAT

SATGAS SOSIAL

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS KESEHATAN

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS SAR

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS PU

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS BANLOG

•NAMA : ...
•NO HP: ...

KETUA : BUPATI/WALIKOTA
WAKIL KETUA : DANDIM
WAKIL KETUA : KAPOLRES

**BAKORNAS PB/
SATKORLAK PB**

LIASION

- DEP. DALAM NEGERI
- DEP. SOSIAL
- DEP. KESEHATAN
- DEP. PEKERJAAN UMUM
- TNI/POLRI
- PMI
- BASARNAS

HUMAS

SEKRETARIAT

SATGAS SOSIAL

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS KESEHATAN

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS SAR

•NAMA : ...
•NO HP: ...

SATGAS PU

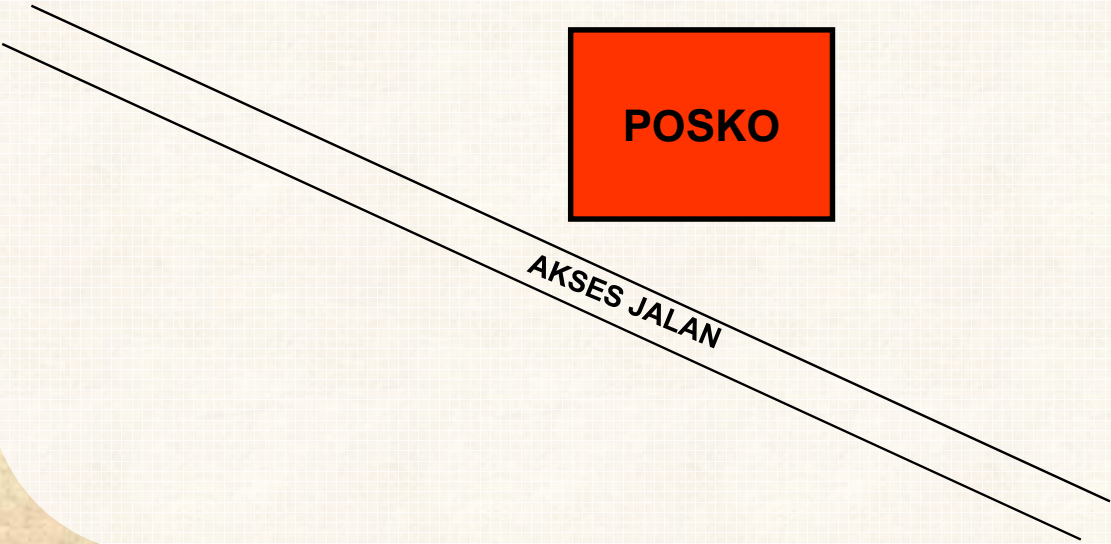
•NAMA : ...
•NO HP: ...

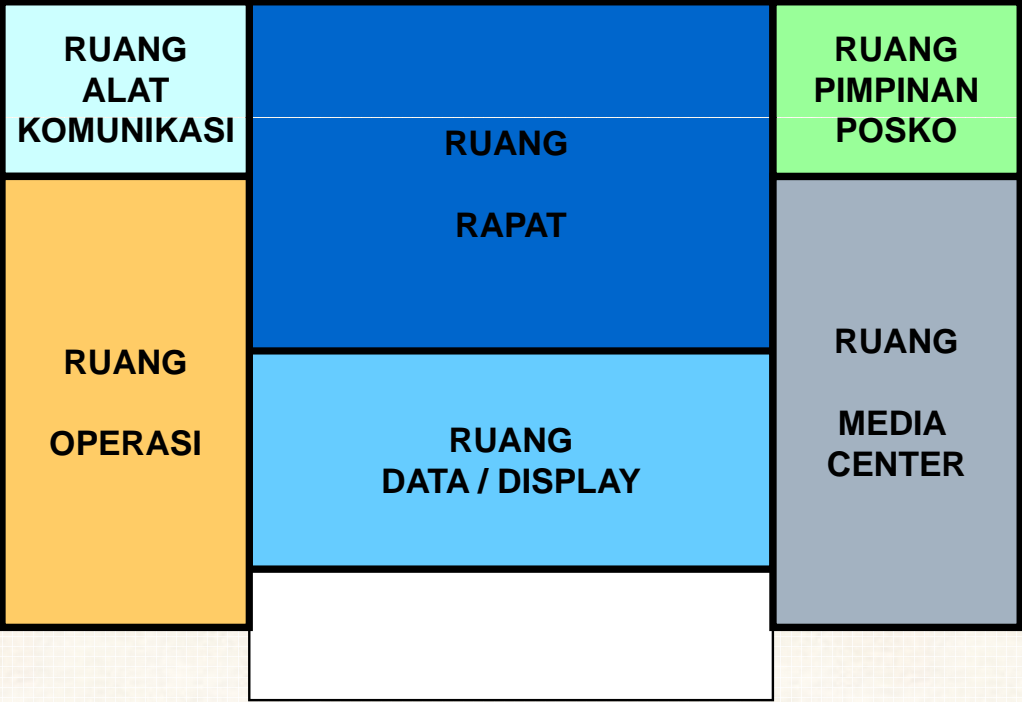
SATGAS BANLOG

•NAMA : ...
•NO HP: ...

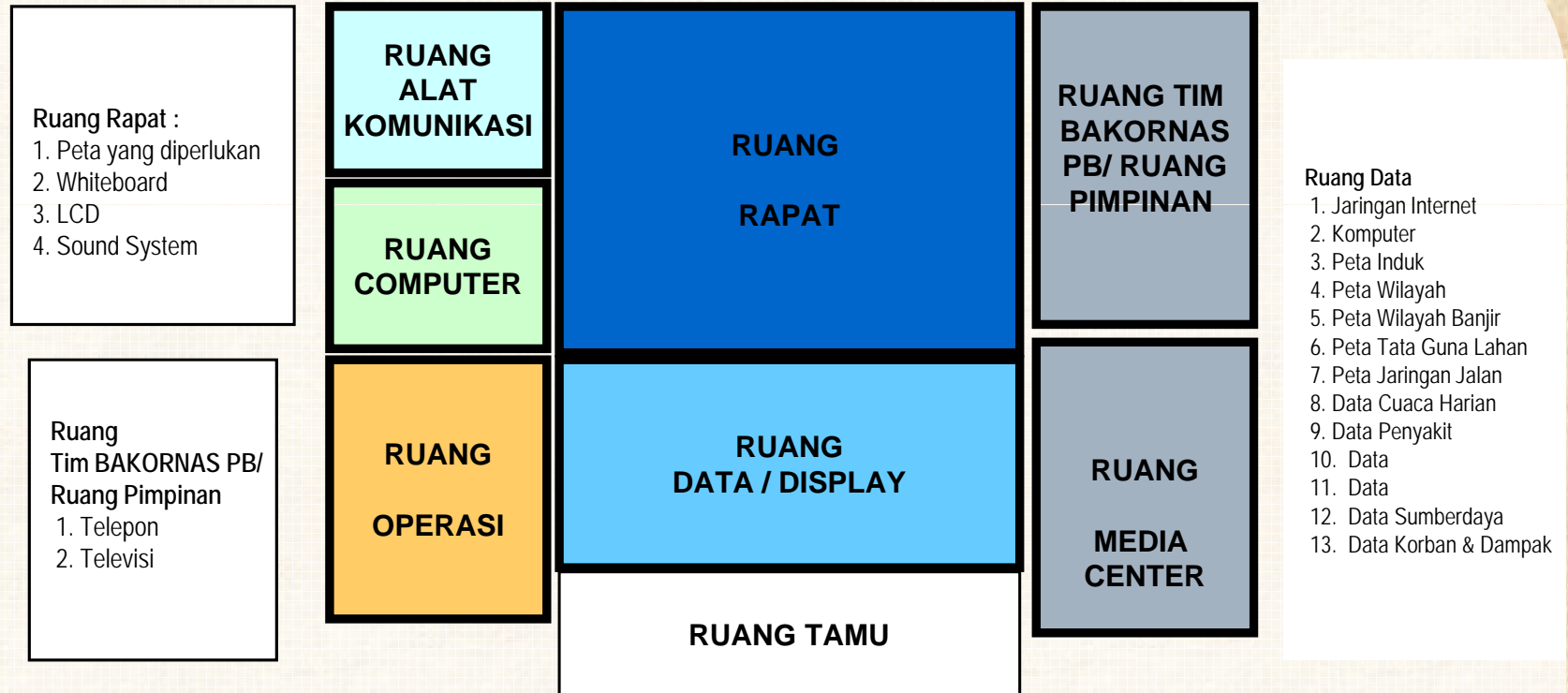


HELLIPAD





KELENGKAPAN RUANG POSKO



Ruang Rapat :

1. Peta yang diperlukan
2. Whiteboard
3. LCD
4. Sound System

**RUANG
ALAT
KOMUNIKASI**

**RUANG
COMPUTER**

**RUANG
OPERASI**

**RUANG
RAPAT**

**RUANG
DATA / DISPLAY**

RUANG TAMU

**RUANG TIM
BAKORNAS
PB/ RUANG
PIMPINAN**

**RUANG
MEDIA
CENTER**

Ruang Data

1. Jaringan Internet
2. Komputer
3. Peta Induk
4. Peta Wilayah
5. Peta Wilayah Banjir
6. Peta Tata Guna Lahan
7. Peta Jaringan Jalan
8. Data Cuaca Harian
9. Data Penyakit
10. Data
11. Data
12. Data Sumberdaya
13. Data Korban & Dampak

**Ruang
Tim BAKORNAS PB/
Ruang Pimpinan**

1. Telepon
2. Televisi

R. Alat Komunikasi

1. Telepon
2. Radio Komunikasi
3. Peta Wilayah
4. Peta Jar Jalan

Ruang Komputer

1. Komputer Lengkap
2. Jaringan Internet
3. Telepon
4. Faximili
5. Mesin Foto Copy

Ruang Operasi

1. Telepon
2. Radio Komunikasi
3. Peta Induk
4. Peta Banjir
5. Peta Lokasi Pengungsi
6. Renc. Kegiatan

R. Media Centre

1. Sound System
2. Televisi
3. Internet



**SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATKORLAK PB)**

Jl. Kantor Satkorlak PB)

Jl.....Tlp/Fax/email (Posko)

**LAPORAN HARIAN POSKO SATKORLAK PB
PERKEMBANGAN PENANGANAN BENCANA BANJIR**

Di PROVINSI

Hari,Bulan 2007.

Jam 16.30 (waktu setempat)

A. KONDISI MUTAKHIR

Indikator yang harus dimasukkan dalam laporan :

- Kondisi cuaca dan perkiraan akan datang diberbagai daerah/kab/kec/lokasi banjir (hujan, berawan, cerah)
- Jumlah dan lokasi pengungsi (tampilkan dalam bentuk peta, diagram, tabel)
- Lokasi banjir, desa/kec/kab serta luas areal yang tergenang (peta lokasi/situasi)
- Akibat yang ditimbulkan :
 - Korban
 - Kerusakan
 - Gangguan kesehatan, peningkatan gangguan saluran pernafasan dan iritasi mata
 - pendidikan (sekolah diliburkan)
 - Gangguan transportasi, telekomunikasi, listrik, dll
 - distribusi/kurangnya pasokan kebutuhan sehari-hari, kenaikan harga (dampak tidak langsung)
 - gangguan aktivitas sehari-hari lainnya (perkantoran, pasar dll)
 - info lainnya yang terkait

B. UPAYA PENANGANAN

Penanganan yang dilakukan pada hari diterbitkannya laporan, informasi diusahakan secara kuantitatif dan kualitatif.

1. Pertolongan dan distribusi bantuan melalui darat, udara, dan/atau sungai/laut:

- a. Lokasi operasi
 - b. Sumberdaya yang dikerahkan (peralatan, personil)
 - c. Target yang diharapkan
 - d. Pelaksana yang terlibat
2. Upaya penanganan lainnya (pelayanan kesehatan, kebersihan, dll)

C. SUMBER DAYA

1. Jumlah persediaan logistik (persediaan termasuk dalam satuan hari)
2. Sumberdaya yang ada/tersedia (personil, peralatan, dana): lokasi, contact person/instansi yang bertanggung jawab. Termasuk sumberdaya yang dimiliki sektor swasta dan masyarakat.
3. Sumberdaya dan logistik yang masih diperlukan/dibutuhkan

D. KEGIATAN KESIAPAN

Berisi tentang rencana kegiatan serta hasil yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

Kemajuan-kemajuan yang diperoleh selama operasi serta kendala-kendala yang dihadapi disertai saran pemecahannya/solusinya.

....., Desember 2007.
Kepala Pelaksana Operasi
Atau Ka. Posko

(.....)